

**MODEL IMPLEMENTASI SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN
DESA (PP NO.32 TAHUN 2004) UNTUK MENDUKUNG
TERWUJUDNYA KINERJA PEMERINTAHAN DESA DAN
PELAYANAN PUBLIK- KABUPATEN INDRAGIRI HILIR RIAU**



Penulis:

Dr.Suryo Pratolo, SE., M.Si., Ak., AAP-A

Drs. Winarso, MM

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
JULI 2013**

MODEL IMPLEMENTASI SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PP NO.32 TAHUN 2004) UNTUK MENDUKUNG TERWUJUDNYA KINERJA PEMERINTAHAN DESA DAN PELAYANAN PUBLIK- KABUPATEN INDRAGIRI HILIR RIAU

Penulis:

Dr.Suryo Pratolo, SE., M.Si., Ak., AAP-A
Drs. Winarso, MM

abstract

This study aims to examine the role of the information system supported by information technology in order to optimize village financial management in Indragiri Local Government. The method of research was conducted by questionnaire survey to 100 village governmental officers. Paired sample t-test is used to examine the capability of the officer in financial management before and after the course. The result of the examination show there is capacity improvement in financial management by all the village governmental officers.

Maximum theoretical value of the average respondent's answer is 50 and a minimum of 10, so the average is 30, based on the number of questions a 10-point questions and each question has a point value ranging from 1 to 5. Based on the data above, although not maximum, prior to the workshop understanding the village officials are below average (24.15) and after the workshop to increase to above average (38.77).

Based on the above findings it is necessary for both the central government and local governments to facilitate the support of information systems in particular financial information system supported by information technology to improve the understanding of the village officials in understanding the philosophy and be able to implement good governance rural finance that can be supported the establishment of good governance government towards civil society.

Keywords: Rural Financial Management System, Financial Reports Village, Model Design, Village Government Performance

A. PENDAHULUAN

Kabupaten Indragiri Hilir berada di Propinsi Riau dengan luas wilayah 18.812,97 km² dan dengan batas-batas wilayah sebelah utara: Kabupaten Pelalawan; sebelah selatan: Kabupaten Tanjung Jabung dan Propinsi Jambi; sebelah barat: Kabupaten Indragiri Hulu; dan sebelah timur: Propinsi Kepulauan Riau. Kabupaten Indragiri Hilir meliputi 20 kecamatan, 174 desa dan 18 kelurahan. Dalam rangka mewujudkan Kabupaten Indragiri sebagai kabupaten yang mandiri strategi yang dilaksanakan adalah perkuatan kemandirian desa, sehingga apabila semua desa se Kabupaten Indragiri telah mandiri maka akan tercipta kabupaten yang mandiri pula. Dalam rangka mewujudkan kemandirian desa, aspek pengelolaan desa menjadi hal yang penting untuk diperhatikan dan ditingkatkan kualitasnya. Berdasarkan peraturan perundangan, pengelolaan desa telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 57 Tahun 2005 tentang Desa yang bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berbeda dengan kelurahan, desa memiliki hak mengatur wilayahnya lebih luas. Desa memiliki kewenangan-kewenangan sebagai berikut:

- Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
- Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
- Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
- Urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa.

Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di atas desa didukung dengan aspek keuangan yang diterima dari masyarakat atau yang disebut dengan dana publik. Pelibatan dana publik dalam urusan pemerintahan membutuhkan suatu sistem pengelolaan keuangan untuk mewujudkan ketercapaian tugas pokok dan fungsi desa secara efektif dan efisien. Sistem pengelolaan keuangan desa yang dikelola oleh pemerintah desa pada saat ini diatur dengan Undang-Undang (UU) nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PP no 72 tahun 2005 tentang Desa, dan Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) no 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pendanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan daerah dan pemerintahan desa menganut prinsip *money follows function* yang berarti bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi

kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan. PP 72 Tahun 2005 mengatur pengelolaan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pengelolaan keuangan desa harus didasarkan pada peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas rencana penerimaan dan pengeluaran desa. Selanjutnya berdasarkan APBDes, pemerintah desa melaksanakan pemungutan pendapatan dan pengeluaran belanja dalam rangka pembangunan desa. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes, selanjutnya pemerintah desa harus menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan desa adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan APBDes dalam aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Pencapaian suatu transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintahan desa harus dapat diwujudkan dengan menerapkan sebuah sistem pengelolaan keuangan pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel. Dengan pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan dengan baik, diharapkan kinerja pemerintahan desa akan meningkat dan tercipta *Good Government Governance*.

Pada kondisi riil di lapangan terkait pengelolaan keuangan desa, secara umum dari hasil penelitian pendahuluan masih banyak kelemahan, antara lain: (1) adanya keterlambatan laporan keuangan dalam penyampaian dari desa ke kecamatan dan kabupaten (2) kurang optimalnya pemahaman perangkat desa terhadap mekanisme pengelolaan keuangan desa sesuai peraturan perundangan yang ada. (3) Masih lemahnya *skill* dalam hal penyusunan laporan keuangan, (4) masih lemahnya infrastruktur sistem dan teknologi informasi.

Kondisi lain saat ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia (SDM) aparatur yang ada sangat jauh dari apa yang diharapkan. Potret SDM aparatur saat ini yang menunjukkan profesionalisme yang belum optimal yang membutuhkan peningkatan kualitas pada SDM aparatur desa. Peningkatan kualitas SDM yang segera dapat dilakukan adalah peningkatan kemampuan atau kompetensi yang dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan (diklat). Perubahan melalui diklat dapat dilakukan dengan melakukan workshop atau pelatihan dengan peningkatan kemampuan atau kompetensi teknis maupun perubahan pola pikir dan perilaku SDM.

Selain melalui workshop atau pelatihan, untuk mengatasi permasalahan di atas alternatifnya adalah penggunaan sistem informasi yang didukung dengan teknologi informasi. Dengan implementasi sistem informasi yang didukung dengan teknologi informasi

diharapkan pengelolaan keuangan desa akan lebih mudah dipahami, lebih cepat dan lebih tepat aplikasinya. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik mengajukan judul Peran Sistem Informasi Yang Didukung Teknologi Informasi Dalam Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Desa Melalui Workshop Sistem Informasi Keuangan Desa (SIKADES): Studi Pada Aparatur Desa Se-Kabupaten Indragiri Hilir.

B. KERANGKA TEORI

Manajemen kinerja adalah suatu upaya untuk memperoleh dan meningkatkan hasil terbaik dari tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu organisasi. Manajemen kinerja bersifat menyeluruh meliputi semua elemen, input yang harus didayagunakan oleh organisasi dan manajemen untuk meningkatkan kinerja organisasi sehingga manajemen kinerja berhubungan dengan perencanaan strategis, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pada semua aspek manajerial. Dari semua aspek manajerial tersebut terkait dengan penggunaan sumber daya termasuk di dalamnya penggunaan sumber daya keuangan yang harus dikelola secara baik.

Dalam pengelolaan keuangan, selalu bisa terjadi kondisi seperti apa yang diungkapkan dalam *agency theory*. Berdasarkan *agency theory*, hubungan keagenan timbul manakala pihak pemberi amanah (*principal*) memberikan amanah kepada pihak lain (*agent*) guna melaksanakan tugas sesuai dengan yang diharapkan *principal*. Pemerintah selaku pihak yang diberikan amanah untuk mengelola dana masyarakat harus mempertanggungjawabkan amanah tersebut, sebaliknya rakyat selaku pemberi amanah akan memberi insentif pada pemerintah berupa kepercayaan politik. *Agency theory* menyatakan bahwa setiap orang cenderung mementingkan dirinya sendiri dan memaksimalkan kemakmurannya melalui keputusan yang diambil dalam organisasi (Jensen dan Meckling, 1976). Diharapkan konflik keagenan dapat dipecahkan dan kebutuhan untuk kepatuhan atau *stewardship* aparatur pemerintahan kepada rakyat dapat dicapai dengan pengelolaan organisasi yang baik termasuk di dalamnya adalah pengelolaan keuangan pemerintahan desa. Berdasarkan kondisi di atas peran aturan, mekanisme, prosedur, pemahaman dan kualitas SDM mengenai tatakelola keuangan organisasi termasuk di dalamnya organisasi pemerintahan desa dibutuhkan.

Pengelolaan atau tatakelola organisasi diistilahkan dengan kata *governance*. Kata *governance* berasal dari kata *to govern* yang artinya memerintah. Tatakelola yang baik atau diistilahkan *good governance* yang memiliki 8 karakteristik utama, meliputi partisipatori, orientasi konsensus, akuntabel, transparan, responsif, efektif dan efisien, keadilan dan

inklusif, dan penegakan hukum (UNDP, 1997). Dalam rangka mencapai *good governance* pemerintahan desa, salah satunya dengan penataan tatakelola keuangan desa yang meliputi perencanaan dan penganggaran, penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa yang bisa mendukung pengungkapan informasi yang menjadi hak masyarakat sebagai pemberi amanah kepada pemerintah desa. Pengungkapan diistilahkan dengan kata *disclosure* memiliki arti tidak menutupi atau tidak menyembunyikan. Gibbins, Richardson and Waterhouse (1990,) mendefinisikan *disclosure* keuangan sebagai pengungkapan informasi baik keuangan maupun non keuangan, kuantitatif maupun kualitatif, wajib maupun sukarela, melalui jalur formal maupun informal. Dengan demikian informasi terkait pengelolaan keuangan yang diungkapkan harus jelas, lengkap, dan dapat menggambarkan secara tepat mengenai kejadian-kejadian ekonomi yang berpengaruh terhadap hasil operasi utama pemerintahan desa yang didanai dari dana publik.

Untuk dapat mewujudkan tatakelola keuangan yang mampu mendukung pengungkapan yang transparan dan akuntabel, tata kelola keuangan pemerintahan desa memerlukan dukungan sistem informasi yang difasilitasi teknologi informasi untuk tercapainya ketepatan dan kecepatan tatakelola keuangan desa. Sistem informasi adalah suatu sistem terintegrasi yang mampu menyediakan informasi yang bermanfaat bagi penggunaanya atau sebuah sistem terintegrasi atau sistem manusia-mesin, untuk menyediakan informasi dalam rangka mendukung operasi, manajemen dalam suatu organisasi. Menurut O'Brien (2005), sistem informasi adalah suatu kombinasi terartur apapun dari *people* (orang), *hardware* (perangkat keras), *software* (piranti lunak), *computer networks* and *data communications* (jaringan komunikasi), dan *database* (basis data) yang mengumpulkan, mengubah dan menyebarkan informasi di dalam organisasi. Sistem informasi untuk mendukung pengelolaan keuangan dikembangkan dengan tujuan meningkatkan kualitas tatakelola keuangan secara efisien dan efektif.

Teknologi informasi dapat didefinisikan sebagai perpaduan antara teknologi komputer dan telekomunikasi dengan teknologi lainnya seperti perangkat keras, perangkat lunak, database, teknologi jaringan, dan peralatan telekomunikasi lainnya. Selanjutnya, teknologi informasi dipakai dalam sistem informasi organisasi untuk menyediakan informasi bagi para pemakai dalam rangka pengambilan keputusan. (Sri Maharsi, 2000). Teknologi informasi adalah hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dari bagian pengirim ke penerima sehingga pengiriman informasi tersebut akan lebih cepat, lebih luas sebarannya, dan lebih lama penyimpanannya. Teknologi Informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan,

memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan.

Ada tiga aspek dalam tata kelola keuangan desa yaitu perencanaan dan penganggaran, penatausahaan keuangan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan, fungsi-fungsi lain yaitu pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan tak akan dapat berjalan. Adapun kegunaan dalam suatu perencanaan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk membedakan arah dari setiap kegiatan dengan jelas sehingga hasil yang diperoleh bisa seefektif dan seefisien mungkin.
- b. Untuk mengevaluasi setiap tujuan-tujuan yang sudah dilakukan sehingga penyimpangan-penyimpangan yang terjadi sehingga bisa dihindari lebih awal.
- c. Memudahkan pelaksanaan kegiatan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mungkin muncul sehingga sehingga lebih waspada dan dapat diselesaikan dengan cepat.
- d. Menghindari pertumbuhan dan perkembangan yang tak terkendali.

Menurut Gomes (1995), anggaran merupakan dokumen yang berusaha untuk mendamaikan prioritas-prioritas program dengan sumber-sumber pendapatan yang diproyeksikan. Anggaran menggabungkan suatu pengumuman dari aktivitas organisasi atau tujuan untuk suatu jangka waktu yang ditentukan dengan informasi mengenai dana yang dibutuhkan untuk aktivitas tersebut atau untuk mencapai tujuan tersebut. Peranan anggaran pada suatu perusahaan merupakan alat untuk membantu manajemen dalam pelaksanaan, fungsi perencanaan, koordinasi, pengawasan dan juga sebagai pedoman kerja dalam menjalankan perusahaan untuk tujuan yang telah ditetapkan.

Dari sisi fungsi perencanaan, anggaran merupakan salah satu fungsi manajemen dan fungsi ini merupakan salah satu fungsi manajemen dan fungsi ini merupakan dasar pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Dari fungsi pengawasan, anggaran merupakan salah satu cara mengadakan pengawasan dalam perusahaan. Pengawasan itu merupakan usaha-usaha yang ditempuh agar rencana yang telah disusun sebelumnya dapat dicapai. Dengan demikian pengawasan adalah mengevaluasi prestasi kerja dan tindakan perbaikan apabila perlu. Aspek pengawasan yaitu dengan membandingkan antara prestasi dengan yang

dianggarkan, apakah dapat ditemukan efisiensi atau apakah para manajer pelaksana telah bekerja dengan baik dalam mengelola perusahaan. Tujuan pengawasan itu bukanlah mencari kesalahan akan tetapi mencegah dan memperbaiki kesalahan. Dari sisi fungsi koordinasi, anggaran yang berfungsi sebagai perencanaan harus dapat menyesuaikan rencana yang dibuat untuk berbagai bagian dalam organisasi, sehingga rencana kegiatan yang satu akan selaras dengan lainnya. Untuk itu anggaran dapat dipakai sebagai alat koordinasi untuk seluruh bagian yang ada dalam organisasi, karena semua kegiatan yang saling berkaitan antara satu bagian dengan bagian lainnya sudah diatur dengan baik. Dari sisi anggaran sebagai pedoman kerja, anggaran merupakan suatu rencana kerja yang disusun sistematis dan dinyatakan dalam unit moneter. Lazimnya penyusunan anggaran berdasarkan pengalaman masa lalu dan taksir-taksiran pada masa yang akan datang, maka ini dapat menjadi pedoman kerja bagi setiap bagian dalam perusahaan untuk menjalankan kegiatannya.

Menurut Marconi dan Siegel (1989), manfaat anggaran adalah:

1. Anggaran merupakan hasil dari proses perencanaan, berarti anggaran mewakili kesepakatan negosiasi di antara partisipan yang dominan dalam suatu organisasi mengenai tujuan kegiatan di masa yang akan datang.
2. Anggaran merupakan gambaran tentang prioritas alokasi sumber daya yang dimiliki karena dapat bertindak sebagai blue print aktivitas perusahaan.
3. Anggaran merupakan alat komunikasi internal yang menghubungkan departemen (divisi) yang satu dengan departemen (divisi) lainnya dalam organisasi maupun dengan manajemen puncak.
4. Anggaran menyediakan informasi tentang hasil kegiatan yang sesungguhnya dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan.
5. Anggaran sebagai alat pengendalian yang mengarah manajemen untuk menentukan bagian organisasi yang kuat dan lemah, hal ini akan dapat mengarahkan manajemen untuk menentukan tindakan koreksi yang harus diambil.
6. Anggaran mempengaruhi dan memotivasi manajer dan karyawan untuk bekerja dengan konsisten, efektif dan efisien dalam kondisi kesesuaian tujuan antara tujuan perusahaan dengan tujuan karyawan.

Penatausahaan keuangan daerah adalah suatu sistem akuntansi yang dilaksanakan baik secara manual maupun berbasis sistem informasi yang dilaksanakan untuk melakukan proses pencatatan, administrasi, dan pelaporan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan berdasarkan pada anggaran yang telah ditetapkan

sebelumnya. Dalam rangka menyusun laporan keuangan desa, perlu disusun sistem akuntansi pemerintahan desa

Globalisasi dan revolusi teknologi informasi-komunikasi menjadi tantangan tersendiri bagi birokrasi dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik, pemerintahan yang bersih, dan berwibawa. Pemanfaatan teknologi informasi dalam birokrasi secara tepat guna, dengan didukung kualitas sumber daya manusia yang baik akan mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas birokrasi untuk meningkatkan kinerjanya. Namun demikian apabila ketersediaan sarana tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara tepat guna dan tidak didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas baik, maka hal tersebut hanya akan menciptakan inefisiensi dan akan menghambat sistem manajemen secara keseluruhan. Artinya dalam hal ini agar kinerja yang dihasilkan dapat bermanfaat atau dapat dicapai dengan cepat, tepat dan bermanfaat bagi masyarakat untuk itu para aparatur harus didukung dengan penerapan sistem dan teknologi informasi. Peran sistem dan teknologi informasi ini sangat penting disamping untuk mengikuti perkembangan teknologi juga untuk bagaimana memanfaatkan teknologi tersebut untuk kelancaran kerja agar nantinya pekerjaan tersebut dapat terselesaikan dengan cepat dan akurat.

Dalam rangka mendukung implementasi pengelolaan keuangan desa, bentuk sistem informasi yang digunakan untuk mendukung pengelolaan keuangan desa sesuai dengan aturan perundang-undangan adalah Sistem Informasi Keuangan Desa yang disingkat dengan SIKADES. SIKADES adalah sistem informasi yang digunakan untuk mendukung tatakelola keuangan desa baik dalam tahapan perencanaan dan penganggaran, penatausahaan keuangan, maupun pelaporan keuangan desa. Untuk dapat mendukung optimasi implementasi tatakelola keuangan desa, selain aspek sistem dan teknologi informasi, aspek kapasitas aparatur desa dalam menguasai tatakelola keuangan desa tersebut merupakan kunci keberhasilan, sehingga pelatihan sistem informasi yang didukung teknologi informasi diduga mampu mendukung pemahaman dan penguasaan tatakelola keuangan desa yang akhirnya meningkatkan optimasi tatakelola keuangan desa itu sendiri.

Berdasarkan uraian pada pembahasan di atas, dirumuskan hipotesis alternatif sebagai berikut:

Ha: Terdapat perbedaan tingkat pemahaman aparatur terhadap tatakelola keuangan desa antara sebelum dan sesudah dilakukan workshop tatakelola keuangan desa menggunakan sistem informasi keuangan desa yang didukung teknologi informasi.

C. METODA PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Sistem Informasi dalam hal ini aplikasi SIADUK yang didukung oleh teknologi informasi berupa komputer dan jaringan internet terhadap optimasi tatakelola keuangan desa. Subjek dari penelitian ini adalah para aparatur pemerintahan desa se-Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau. Sampel yang digunakan sejumlah 100 aparatur desa meliputi kepala desa dan sekretaris desa.

Data mengenai desa di Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Desa se Kabupaten Indragiri Hilir

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|
| Kecamatan Batang Tuaka | Desa Gemilang Jaya | Kecamatan Concong | Desa Concong Dalam |
| | Desa Kuala Sebatu | | Desa Concong Luar |
| | Desa Sialang Jaya | | Desa Concong Tengah |
| | Desa Sungai Dusun | | Desa Kampung Baru |
| | Desa Sungai Junjangan | | Desa Panglima Raja |
| | Desa Sungai Luar | | Desa Sungai Berapit |
| | Desa Sungai Piring | | |
| | Desa Sungai Rawa | | |
| | Desa Sungai Raya | | |
| | Desa Tanjung Siantar | | |
| | Desa Tasik Raya | | |
| Kecamatan Enok | Desa Bagan Jaya | 4. Kecamatan Gaung | Desa Belantaraya |
| | Desa Enok | | Desa Jerambang |
| | Desa Jaya Bhakti | | Desa Kuala Lahang |
| | Desa Pengalihan | | Desa Lahang Baru |
| | Desa Pusaran | | Desa Lahang Hulu |
| | Desa Rantau Panjang | | Desa Lahang Tengah |
| | Desa Simpang Tiga | | Desa Pungkat |
| | Desa Suhada | | Desa Simpang Gaung |
| | Desa Sungai Ambat | | Desa Sungai Baru |
| | Desa Sungai Lokan | | Desa Teluk Kabung |
| | Desa Sungai Rukam | | Desa Terusan Kempas |
| Desa Teluk Medan | | | |
| Kecamatan Gaung Anak Serka | Desa Kuala Gaung | Kecamatan Kateman | Desa Air Tawar |
| | Desa Rambaian | | Desa Kuala Selat |
| | Desa Sungai Empat | | Desa Penjuru |
| | Desa Sungai Iliran | | Desa Sari Mulia |
| | Desa Teluk Pantaian | | Desa Sungai Simbar |
| | Desa Teluk Pinang | | Desa Sungai Teritip |
| | Desa Teluk Sungka | | Desa Tagaraja |
| | Desa Teluk Tuasan | | Desa Tanjung Raja |
| Kecamatan Kempas | Desa Bayas Jaya | Kecamatan Kemuning | Desa Air Balui |
| | Desa Harapan Tani | | Desa Batu Ampar |
| | Desa Karya Tani | | Desa Dusun Tuk Jimun |
| | Desa Kempas Jaya | | Desa Kemuning Muda |
| | Desa Pekan Tua | | Desa Kemuning Tua |
| | Desa Rumbai Jaya | | Desa Keritang |
| | Desa Sungai Arah | | Desa Limau Manis |
| | Desa Sungai Gantang | | Desa Lubuk Besar |
| | | | Desa Sekara |
| | Desa Selensen | | |

| | | | |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| | | | Desa Talang Jangkang |
| Kecamatan Keritang | Desa Kembang Mekar Sari | Kecamatan Kuala Indragiri | Desa Perigi Raja |
| | Desa Kota Baru Reteh | | Desa Sapat |
| | Desa Kota Baru Seberida | | Desa Sungai Bela |
| | Desa Kuala Keritang | | Desa Sungai Buluh |
| | Desa Kuala Lemang | | Desa Sungai Piyai |
| | Desa Nusantara Jaya | | Desa Tanjung Lajau |
| | Desa Pancur | | Desa Tanjung Melayu |
| | Desa Pasar Kembang | | Desa Teluk Dalam |
| | Desa Pebenaan | | |
| | Desa Pengalihan/Pengalehan | | |
| | Desa Seberang Pebenaan | | |
| | Desa Sencalang | | |
| | Desa Teluk Kelasa | | |
| Kecamatan Mandah | Desa Bakau Aceh | Kecamatan Pelangiran | Desa Bagan Jaya |
| | Desa Bantaian | | Desa Catur Karya |
| | Desa Batang Sari | | Desa Gaung/Baung Rejo Jaya |
| | Desa Batang Tumu | | Desa Intan Mulia/Mulya Jaya |
| | Desa Bekawan | | Desa Pelangiran |
| | Desa Belaras | | Desa Pinang Jaya |
| | Desa Bente | | Desa Rotan Semelur |
| | Desa Bolak Raya | | Desa Saka Palas Jaya |
| | Desa Igal | | Desa Simpang Kateman |
| | Desa Khairiah Mandah | | Desa Tagagiri Raja |
| | Desa Pelanduk | | Desa Tagagiri Tama Jaya |
| | Desa Pulau Cawan | | Desa Tanjung Simpang |
| | | | Desa Tegal Rejo |
| | Desa Teluk Bunian | | |
| | Desa Wonosari | | |
| Kecamatan Pulau Burung | Desa Bangun Harjo Jaya | Kecamatan Reteh | Desa Mekar Sari |
| | Desa Beringin Jaya | | Desa Pulau Kecil |
| | Desa Binangun Jaya | | Desa Pulau Kijang |
| | Desa Bukit Sari Intan Jaya | | Desa Pulau Ruku |
| | Desa Keramat/Kramat Jaya | | Desa Sanglar |
| | Desa Manunggal Jaya | | Desa Seberang Pulau Kijang |
| | Desa Mayang Sari Jaya | | Desa Seberang Sanglar |
| | Desa Pulau Burung | | Desa Sungai Asam |
| | Desa Ringin Jaya | | Desa Sungai Terab/Terap |
| | Desa Sapta Jaya | | Desa Sungai Undan |
| | Desa Sempadan Jaya | | |
| | Desa Sri Danai | | |
| | Desa Suka Jaya | | |
| | Desa Suko Harjo Jaya | | |
| | Desa Sungai Danai | | |
| Desa Teluk Nibung | | | |
| Kecamatan Sungai Batang | Desa Benteng | Kecamatan Tanah Merah | Desa Selat Nama |
| | Desa Benteng Barat | | Desa Sungai Laut |
| | Desa Benteng Utara | | Desa Sungai Nyiur |
| | Desa Kuala Patah Parang | | Desa Tanah Merah |
| | Desa Kuala Sungai Batang | | Desa Tanjung Baru |
| | Desa Pesanggerahan (Pasenggarahan) | | Desa Tanjung Pasir |

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| | | | Desa Tekulai Bugis |
| | | | Desa Tekulai Hilir |
| | | | Desa Tekulai Hulu |
| Kecamatan Teluk Belengkong | Desa Beringin Mulya | Kecamatan Tembilahan | Desa Tembilahan Hilir |
| | Desa Gembaran | | Desa Pekan Arba |
| | Desa Griya Mukti Jaya | | Desa Seberang Tembilahan |
| | Desa Hibrida Jaya | | Desa Sungai Perak |
| | Desa Hibrida Mulya | | Desa Tembilahan Kota |
| | Desa Indra Sari Jaya | | Desa Sungai Beringin |
| | Desa Kelapa Patih Jaya | | |
| | Desa Saka Rotan | | |
| | Desa Sapta Mulya Jaya | | |
| | Desa Sumber Jaya | | |
| | Desa Sumber Makmur Jaya | | |
| | Desa Sumber Sari Jaya | | |
| | Desa Tunggal Rahayu Jaya | | |
| Kecamatan Tembilahan Hulu | Desa Pekan Kamis | Kecamatan Tempuling | Desa Harapan Jaya |
| | Desa Pulau Palas | | Desa Karya Tunas Jaya |
| | Desa Sialang Panjang | | Desa Mumpa |
| | Desa Tembilahan Hulu | | Desa Sungai Salak |
| | | | Desa Teluk Jira |
| | | | Desa Teluk Kiambang |
| | Desa Tempuling | | |

Instrumen penelitian ini berupa kuisioner dengan 10 pertanyaan yang mengukur tingkat pemahaman para responden terhadap tatakelola keuangan desa. Kuesioner diberikan sebelum dan sesudah diberikan pelatihan intensif aplikasi pengelolaan keuangan desa dengan poin-poin pertanyaan terkait mekanisme pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri no. 37 tahun 2007. Dari pertanyaan yang diberikan, dihasilkan data pemahaman aparatur daerah mengenai pengelolaan keuangan desa sebelum pelatihan dan sesudah pelatihan. Selanjutnya dari data tersebut dilakukan analisis untuk didapatkannya gambaran mengenai kondisi fenomena.

Metode analisis data terdiri dari uji validitas, uji reabilitas, dan uji beda dua rata-rata. Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengujian validitas terhadap item pertanyaan (validitas item). Pengertian dari validitas item adalah bahwa setiap item (pertanyaan) dapat dikatakan valid jika mempunyai dukungan yang kuat terhadap skor total. Dengan kata lain, sebuah item pertanyaan dikatakan mempunyai validitas yang tinggi jika terdapat skor kesejajaran (korelasi yang tinggi) terhadap skor total item. Pengujian terhadap validitas item ini dilakukan dengan mengkorelasikan masing-masing skor butir pertanyaan dengan total skor untuk masing-masing variabel menggunakan korelasi Product Momen Pearson (Syahri Alhusni, 2002). Apabila angka korelasi signifikan berarti alat ukur tersebut valid dan layak digunakan dalam pengujian hipotesis penelitian

Pengujian reliabilitas atau keandalan adalah berkaitan dengan tingkat kepercayaan terhadap instrumen penelitian. Penerapan uji reliabilitas ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah instrumen berupa kuesioner pada dasarnya menunjukkan tingkat ketepatan, keakuratan, kestabilan atau konsistensi yang baik dalam mengungkapkan gejala tertentu dari sekelompok individu, walaupun dilakukan dalam waktu yang berbeda. Dapat disimpulkan, reliabilitas instrumen berhubungan dengan ketepatan hasil penelitian. Uji reliabilitas dilakukan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang sudah valid untuk mengetahui sejauhmana hasil pengukuran tetap konsisten bila dilakukan pengukuran kembali terhadap gejala yang sama. Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan teknik belah dua, yaitu suatu metode yang dilakukan dengan cara mengkorelasikan skor pada kelompok pertanyaan nomor ganjil dengan skor pada kelompok pertanyaan nomor genap, yang langkah kerjanya adalah sebagai berikut: (1) membagi pertanyaan-pertanyaan menjadi dua belah yaitu kelompok genap dan kelompok ganjil; (2) skor untuk masing-masing pertanyaan pada tiap belahan dijumlahkan sehingga menghasilkan dua skor total untuk masing-masing responden; (3) mengkorelasikan skor total belahan pertama dengan skor total belahan kedua dengan korelasi product moment; dan (4) menentukan tingkat reliabilitas semua pertanyaan dengan rumus Spearman-Brown sebagai berikut:

$$rb = \frac{2ri}{1 + ri}$$

di mana ri = korelasi antaraskor-skor belahan tes

rb = koefisien reliabilitas yang telah disesuaikan

Reliabilitas dari setiap pertanyaan akan ditunjukkan dengan nilai sig (*p value*) dari hasil korelasi product moment. Tinggi rendahnya korelasi ditunjukkan dengan nilai rb sesuai rumus Spearman-Brown. Nilai rb di atas 0,5 menunjukkan reliabilitas yang tinggi (Syahri Al Husni, 2002).

Untuk pengujian Peran Sistem Informasi Yang Didukung Teknologi Informasi Dalam Optimasi Pengelolaan Keuangan Desa digunakan uji beda dua-rata-rata. Teori uji rata-rata T-Test adalah sebuah teori dalam statistik yang digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan di antara dua rata-rata nilai kelompok sampel.

D. HASIL PENELITIAN

Dari hasil pengujian validitas instrumen pertanyaan pada saat pretest menggunakan software SPSS dihasilkan output analisis korelasi butir pertanyaan dengan total skor pertanyaan adalah sebagai berikut:

| | | Pretest01 | Pretest02 | Pretest03 | Pretest04 | Pretest05 | Pretest06 | Pretest07 | Pretest08 | Pretest09 | Pretest10 | PretestTotal |
|--------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| Pretest01 | Pearson Correlation | 1 | ,108 | ,080 | ,030 | ,143 | ,131 | ,091 | ,069 | ,180 | ,120 | ,350** |
| | Sig. (2-tailed) | | ,283 | ,430 | ,786 | ,154 | ,194 | ,370 | ,560 | ,073 | ,233 | ,000 |
| | N | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Pretest02 | Pearson Correlation | ,108 | 1 | ,005 | -,199* | -,006 | -,028 | ,067 | ,097 | ,091 | ,074 | ,238** |
| | Sig. (2-tailed) | ,283 | | ,960 | ,048 | ,949 | ,785 | ,506 | ,335 | ,366 | ,462 | ,018 |
| | N | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Pretest03 | Pearson Correlation | ,080 | ,005 | 1 | ,145 | ,063 | ,144 | ,079 | ,118 | ,095 | ,196 | ,370** |
| | Sig. (2-tailed) | ,430 | ,960 | | ,151 | ,598 | ,153 | ,433 | ,244 | ,348 | ,051 | ,000 |
| | N | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Pretest04 | Pearson Correlation | ,030 | -,199* | ,145 | 1 | -,090 | -,066 | -,050 | ,162 | ,100 | ,125 | ,224* |
| | Sig. (2-tailed) | ,786 | ,048 | ,151 | | ,374 | ,517 | ,624 | ,107 | ,324 | ,215 | ,025 |
| | N | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Pretest05 | Pearson Correlation | ,143 | -,006 | ,063 | -,090 | 1 | ,043 | ,088 | -,136 | -,013 | -,033 | ,208** |
| | Sig. (2-tailed) | ,154 | ,949 | ,598 | ,374 | | ,688 | ,388 | ,178 | ,898 | ,747 | ,037 |
| | N | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Pretest06 | Pearson Correlation | ,131 | -,028 | ,144 | -,066 | ,043 | 1 | ,719** | ,560** | ,699** | ,680** | ,758** |
| | Sig. (2-tailed) | ,194 | ,785 | ,153 | ,517 | ,688 | | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 |
| | N | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Pretest07 | Pearson Correlation | ,091 | ,067 | ,079 | -,050 | ,088 | ,719** | 1 | ,572** | ,485** | ,670** | ,728** |
| | Sig. (2-tailed) | ,370 | ,508 | ,433 | ,624 | ,388 | ,000 | | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 |
| | N | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Pretest08 | Pearson Correlation | ,069 | ,097 | ,118 | ,162 | -,136 | ,560** | ,572** | 1 | ,632** | ,603** | ,710** |
| | Sig. (2-tailed) | ,560 | ,335 | ,244 | ,107 | ,178 | ,000 | ,000 | | ,000 | ,000 | ,000 |
| | N | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Pretest09 | Pearson Correlation | ,180 | ,091 | ,095 | ,100 | -,013 | ,699** | ,485** | ,632** | 1 | ,689** | ,770** |
| | Sig. (2-tailed) | ,073 | ,366 | ,348 | ,324 | ,898 | ,000 | ,000 | ,000 | | ,000 | ,000 |
| | N | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Pretest10 | Pearson Correlation | ,120 | ,074 | ,196 | ,125 | -,033 | ,680** | ,670** | ,603** | ,689** | 1 | ,804** |
| | Sig. (2-tailed) | ,233 | ,462 | ,051 | ,215 | ,747 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | | ,000 |
| | N | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| PretestTotal | Pearson Correlation | ,350** | ,236** | ,370** | ,224* | ,208* | ,758** | ,728** | ,710** | ,770** | ,804** | 1 |
| | Sig. (2-tailed) | ,000 | ,018 | ,000 | ,025 | ,037 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | |
| | N | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

** .Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* .Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Data di atas menunjukkan bahwa semua korelasi antara nilai butir pertanyaan yang meliputi pertanyaan 1 sampai dengan pertanyaan 10 dengan nilai total semua butir pertanyaan adalah signifikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa instrumen penelitian berupa butir-butir pertanyaan dapat dikatakan valid atau benar-benar dapat digunakan sebagai alat ukur untuk sesuatu yang seharusnya diukur.

Dari hasil uji korelasi antara skor jawaban nomor ganjil dengan skor jawaban nomor genap pada saat pre test dihasilkan output sebagai berikut:

| | | Skor Ganjil Pre | Skor Genap Pre |
|-----------------|---------------------|-----------------|----------------|
| Skor Ganjil Pre | Pearson Correlation | 1 | ,998** |
| | Sig. (2-tailed) | | ,000 |
| | N | 100 | 100 |
| Skor Genap Pre | Pearson Correlation | ,998** | 1 |
| | Sig. (2-tailed) | ,000 | |
| | N | 100 | 100 |

** .Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Berdasarkan hasil korelasi di atas, maka nilai r_b adalah sebesar $(2 \times 0,998) / (1 + 0,998) = 0,99$ yang artinya semua skor butir pertanyaan pada instrumen penelitian adalah reliabel, artinya

kuesioner sebagai instrumen penelitian memiliki konsistensi yang tinggi dalam mengukur variabel yang diteliti.

Dari hasil uji hipotesis menggunakan paired sample t test yang diolah menggunakan software SPSS, didapatkan hasil output sebagai berikut:

| | | Mean | N | Std. Deviation | Std. Error Mean |
|--------|---------------|-------|-----|----------------|-----------------|
| Pair 1 | Skor Posttest | 38,77 | 100 | 9,870 | ,987 |
| | Skor Pretest | 24,15 | 100 | 12,473 | 1,247 |

| | | Paired Differences | | | | t | df | Sig. (2-tailed) | |
|--------|------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|---|--------|--------|-----------------|------|
| | | Mean | Std. Deviation | Std. Error Mean | 95% Confidence Interval of the Difference | | | | |
| | | | | | Lower | Upper | | | |
| Pair 1 | Skor Posttest - Skor Pretest | 14,620 | 10,606 | 1,061 | 12,516 | 16,724 | 13,785 | 99 | ,000 |

Data di atas menunjukkan bahwa rata-rata pemahaman para aparatur desa meningkat setelah dilaksanakan workshop intensif SIADUK yang didukung teknologi informasi, terbukti bahwa nilai skor pemahaman tentang pengelolaan desa sebelum dilakukan workshop SIADUK adalah sebesar 24,15 menjadi 38,77. Dari uji signifikansi ditunjukkan bahwa perbedaan kondisi pemahaman terhadap pengelolaan keuangan desa tersebut adalah signifikan yang ditunjukkan dengan nilai sig sebesar 0,000 yang artinya Hipotesis yang menyatakan terdapat perbedaan pemahaman para aparatur desa terhadap pengelolaan keuangan desa antara sebelum dan sesudah pelaksanaan workshop SIADUK yang didukung teknologi informasi.

Nilai teoretis maksimal rata-rata jawaban responden adalah 50 dan minimal sebesar 10 sehingga rata-ratanya adalah 30, mendasarkan pada jumlah pertanyaan sejumlah 10 butir pertanyaan dan masing-masing butir pertanyaan memiliki nilai dengan kisaran antara 1 sampai dengan 5. Berdasarkan data di atas maka meskipun belum maksimal, sebelum dilakukan workshop pemahaman para aparatur desa ada di bawah rata-rata (24,15) dan setelah dilakukan workshop meningkat menjadi di atas rata-rata (38,77)

E. KESIMPULAN

Pemerintahan desa sebagai sebuah institusi pelayanan publik dengan menggunakan dana publik, sangat penting untuk senantiasa menciptakan suatu mekanisme transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana publik tersebut dalam rangka mewujudkan Good Governance. Organisasi yang selalu belajar menjadi stimulus yang kuat, terkait fungsi pemerintah sebagai

agent yang melakukan fungsi perubahan bagi masyarakat. Tuntutan pengelolaan pemerintahan desa yang baik semakin meningkat dengan semakin tingginya daya kritis masyarakat. Terkait hal tersebut pemerintah harus merespon dengan meningkatkan kualitas manajerialnya termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian menunjukkan adanya peran dari sistem informasi yang didukung teknologi informasi dalam rangka peningkatan pemahaman aparatur desa terhadap pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan temuan di atas penting kiranya bagi pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk memfasilitasi dukungan sistem informasi khususnya sistem informasi keuangan yang didukung teknologi informasi untuk dapat meningkatkan pemahaman para aparatur desa dalam memahami filosofi dan mampu melaksanakan tatakelola keuangan desa yang baik sehingga bisa terdukung terwujudnya good government governance menuju masyarakat madani.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Sri Maharsi, 2000. Jurnal Akuntansi & Keuangan Vol. 2, No. 2, Nopember 2000: 127 – 137 Jurusan Ekonomi Akuntansi, Fakultas Ekonomi. Universitas Kristen Petra
- Alhusin, Syahri, 2003. Aplikasi Statistik Dengan SPSS.10 for windows. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu
- Gibbins, M., Richardson, A., & Waterhouse, J. (1990). The Management of Corporate Financial Disclosure: Opportunism, Ritualism, Policies, and Processes. *Journal of Accounting Research*, 28(1), 121-143
- O'Brein, James A., (2005), "Pengantar Sistem Informasi", Penerbit : Salemba 4, Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri no 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Pemerintah no 72 tahun 2005 tentang Desa
- Siegel, Gary & Helene Ramanauskas Marconi, "Behavioral Accounting", South Western Publishing Co., Cincinnati, Ohio, 1989.
- Undang-Undang no. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- United Nations Development Programme, 1997. Governance for Sustainable Human Development. New York: UNDP